

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LAWANG URU DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRIALISASI

Deri Susanto, S.Th., M.Si.^{1*}, Liliyantje, S.Th., M.Si.², Eva Inriani, M.Th.³, Kurniawan Netanyahu, M.A.³, Daido Tri Sampurna Raja, M.Th.⁴, Nasa Garuda⁵, Diren Nisapingka⁶, Jinny Ningsih⁷, Arisna Ariyani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya

*Korespondensi : derisusanto83@gmail.com

ABSTRACT

The era of industrialization has transformed economic dynamics in numerous regions, impacting local communities. While it brings about positive outcomes like increased welfare, industrialization also poses risks to sustainable development and the environment. This study adopts a qualitative approach, drawing from interviews with village government officials and community members, as well as through forum group discussions (FGDs). It underscores the significance of empowering village communities to confront industrialization. However, field findings highlight the imperative need for building social capital in Lawang Uru Village. Therefore, the initial step to undertake is the establishment of social capital in Lawang Uru Village. The research concludes that the empowerment program in this village aims to harness the potential of natural and human resources to enhance community welfare sustainably, particularly in the industrialization era. Nonetheless, the presence of social capital stands as a pivotal determinant for the success of community empowerment initiatives in any locale, including Lawang Uru Village.

Keywords : Economic; Industrialization, Empowerment, Villagers, Social capital

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 25/01/2024

Diterima : 07/03/2024

Dipublikasikan : 21/04/2024

ABSTRAK

Era industrialisasi telah mengubah pola ekonomi di banyak daerah, mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Meskipun membawa dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan, industrialisasi juga membawa risiko bagi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperoleh sumber dari wawancara kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa baik secara internal ataupun melalui kegiatan *forum group discussion* (fgd). Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi industrialisasi. Namun, dengan berdasarkan temuan dilapangan bahwa diperlukan adanya pembentukan modal sosial di Desa Lawang Uru. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilaksanakan adanya dengan membentuk modal sosial di Desa Lawang Uru. Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah program

pemberdayaan di desa ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan terutama di era industrialisasi. Namun, keberadaan modal sosial menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam sebuah daerah termasuk di Desa Lawang Uru.

Kata Kunci: Ekonomi; Industrialisasi; Pemberdayaan; Masyarakat Desa; Modal Sosial

PENDAHULUAN

Gelombang globalisasi terus mengubah banyak hal, termasuk kehidupan masyarakat pedesaan. Aspek ekonomi, politik dan budaya semua terkena dampak dari globalisasi tersebut diantaranya adalah pergerakan siklus roda perekonomian yang dipaksa untuk terus melaju. Dari antara banyak fenomena dampak globalisasi yang terjadi di era kontemporer ini terutama dalam aspek perekonomian dan pembangunan nasional adalah industrialisasi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, industrialisasi menjadi salah satu strategi ekonomi yang seringkali digunakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. (AR Chaerudin et al., 2020). Industrialisasi diyakini dapat menjadi motor transformasi ekonomi dan membantu percepatan pembangunan nasional. Industrialisasi ini juga dipandang sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan menekan angka kemiskinan. (Pan et al., 2023). Keberadaan sebuah industri tidak hanya ditentukan oleh tren pasar yang bergantung pada kebutuhan masyarakat; potensi sumber daya alam suatu daerah juga menjadi salah satu indikator keberadaan industri.

Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi salah satu daya tarik para pengusaha untuk membangun industrinya. Keberadaan berbagai industri di Indonesia telah membantu program pembangunan nasional terutama meningkatkan pemasukan negara. Kesejahteraan penduduk juga terbantu oleh kehadiran industri seperti memberikan lapangan pekerjaan ataupun bagi hasil dari aktivitas produksi. Namun, keberadaan industri di Indonesia perlu dikawal dan mendapat

perhatian serius agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan tidak sesuai dengan pedoman pembangunan berkelanjutan. (Fanny Inayah et al., 2022).

Dalam beberapa Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya mencatat bahwa pada akhir tahun 1960-an, terjadi peningkatan yang signifikan dalam fenomena industrialisasi, dengan dukungan yang kuat dari masyarakat desa (Bertrand & Osborne, 1959). Dukungan ini muncul karena kepercayaan bahwa industrialisasi dapat menjadi solusi ekonomi bagi daerah pedesaan yang memiliki tingkat pendapatan rendah. (Bertrand & Osborne, 1959; Darkoh & Kinyanjui, 2015). Industrialisasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. (Elfaki et al., 2021).

Fenomena industrialisasi di beberapa daerah di Indonesia terutama wilayah pedesaan sebagian besar didominasi oleh industri perkebunan dan industri pertambangan (Sugiswati, 2012). Industrialisasi memberikan dampak kepada masyarakat pedesaan khususnya dalam hal lapangan kerja. Salah satu faktor pendorong utama perubahan ketenagakerjaan global adalah tren demografi dan industrialisasi dan ini sangat terlihat di negara-negara berkembang (Ahmed et al., 2022; Al Siddiq et al., 2019; Li et al., 2023). Poin utama yang sering diperbincangkan ketika membahas industrialisasi dan masyarakat desa adalah sejauh mana masyarakat desa siap menghadapi perubahan tersebut serta kemampuan mereka untuk bertahan. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat. Program semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan membangun wilayah tempat tinggal mereka (Nurkomala et al., 2023). Desa merupakan wilayah yang kaya akan berbagai potensi sumber daya, terutama di sektor ekonomi, lingkungan alam, dan kekayaan warisan sosial budaya. Potensi ini memiliki peranan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang diminati oleh banyak perusahaan asing ataupun dalam negeri untuk memulai aktivitas industri mereka. Industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi contoh industri yang banyak ditemukan di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. (Firdaus et al., 2022; Ma'rif et al., 2020). Lokus Pengabdian Kepada Masyarakat yang dipilih oleh peneliti yakni Desa Lawang Uru, Kabupaten Pulang Pisau juga merupakan daerah yang terdapat keberadaan perusahaan kelapa sawit. Keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Lawang Uru telah cukup lama yakni pada tahun 2017 lalu dan aktivitas panen kelapa sawit telah dilakukan kurang lebih 5 (lima) kali panen yang diketahui oleh aparat desa. Secara hukum perundang-undangan yakni menurut Permentan No 26 Tahun 2007 menuliskan bahwa perusahaan wajib memberikan plasma sawit sebesar 20% kepada masyarakat setempat. Plasma sawit ini nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas publik di daerah tersebut seperti fasilitas pendidikan ataupun kesehatan. (Firdaus et al., 2022)

Namun, masyarakat tentunya tidak bisa menggantungkan kehidupannya pada plasma sawit tersebut. Masyarakat terutama di pedesaan wajib mempertahankan kesejahteraan mereka secara mandiri. Adapun salah satu bentuk program membangun masyarakat desa yang mandiri secara perekonomian adalah dengan program pemberdayaan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat telah tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

yang mana dalam aturan ini mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa adalah usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui pengembangan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat desa.

Dengan pemahaman tersebut, pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai inisiatif untuk mendukung masyarakat desa dalam mengembangkan kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar, khususnya dalam konteks desa. (Harun et al., 2021). Pemanfaatan sumber daya yang tersedia di desa ini tidak akan dapat berjalan efektif apabila tidak dibekali pendampingan kemampuan bagi masyarakat desa yang instensif. Tentunya tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa yang umumnya bersifat relatif di masing-masing daerah.

Desa Lawang Uru yang memiliki banyak potensi baik sumber daya alam (SDA) ataupun kualitas sumber daya manusia (SDM). Keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Lawang Uru tidak serta merta menjadi sumber utama penyokong perekonomian masyarakat desa. Masyarakat Desa Lawang Uru cenderung lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka yakni melalui aktifitas pertambangan di pesisir Sungai Kahayan. Fenomena kondisi masyarakat desa dan kondisi alam Desa Lawang Uru menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan agar terciptakan kesejahteraan desa yang berkelanjutan. Adapun pertimbangan utama yang ditemukan oleh peneliti adalah kondisi lingkungan yang dapat rusak apabila masyarakat desa secara subsisten menggantungkan kehidupannya pada aktifitas pertambangan. Demikian pula pada keberadaan

kebun kelapa sawit yang berpotensi merusak ekosistem lingkungan.

Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lawang Uru adalah belum terbentuknya modal sosial di masyarakat desa Lawang Uru. Modal sosial merupakan faktor penting untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam modal sosial ini terdapat perasaan saling memiliki dan keinginan untuk saling membangun. Modal sosial ini juga dapat dipahami sebagai pondasi utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini pada pembahasan urgensi program pemberdayaan masyarakat Desa Lawang Uru dalam menghadapi era industrialisasi. Pengabdian Kepada Masyarakat ini memanfaatkan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta diskusi kelompok (Forum Group Discussion/FGD) yang diselenggarakan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kahinje, Desa Lawang Uru, Kabupaten Pulang Pisau. Subyek utama Pengabdian Kepada Masyarakat adalah masyarakat dan aparatur pemerintahan Desa Lawang Uru. FGD dihadiri sebanyak 50 (lima puluh) peserta yang terdiri masyarakat desa, tokoh agama dan aparatur Desa Lawang Uru. Peneliti melibatkan kelompok profesional dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait model pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat desa Lawang Uru, khususnya dalam menghadapi era industrialisasi. Para peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari beberapa jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat terbaru serta buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan topik Pengabdian Kepada Masyarakat ini yakni perihal pemberdayaan masyarakat. Semua data yang

diperoleh akan dianalisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) kemudian dideskripsikan dengan menggunakan teori dan konsep pemberdayaan (empowerment), pemberdayaan masyarakat dan modal sosial.

Penjelasan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diuraikan sebagai berikut:

1. Peneliti mendapatkan informasi dari seorang mahasiswa yang mengeluhkan adanya potensi menurunnya angka partisipasi sekolah di Desa Lawang Uru.
2. Peneliti melaksanakan kunjungan ke Desa Lawang Uru dan melakukan observasi pertama di desa tersebut.
3. Peneliti melaksanakan kunjungan kedua guna bertemu dengan aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat yakni pemuka agama di Desa Lawang Uru.
4. Peneliti mengadakan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Provinsi Kalimantan Tengah dan menyepakati rencana sosialisasi di Desa Lawang Uru.
5. Peneliti mengundang masyarakat desa untuk menghadiri Forum Group Discussion (FGD) dan sosialisasi di GKE Kahinje dengan mendatangkan perwakilan dari DPMD sebagai narasumber utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fenomena Industrialisasi di Desa Lawang Uru

Desa Lawang Uru berada di Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Lawang Uru merupakan salah satu desa terluas yakni sebesar 50 km² atau 8,63% dari kecamatan Banama Tingang. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah populasi penduduk Desa Lawang Uru adalah sebanyak 1224 jiwa yang terdiri atas 589 perempuan dan 635 laki-laki. Secara geografis Desa Lawang Uru dialiri salah satu sungai terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Sungai Kahayan. Sebagian besar

penduduk desa menggunakan pesisir Sungai Kahayan sebagai sumber pendapatan utama yakni melalui kegiatan penambangan (tambang emas) hal ini diketahui melalui wawancara dengan penduduk desa dan aktifnya mobilitas kendaraan berkapasitas yang mengangkut peralatan tambang. Berdasarkan pengamatan peneliti lokasi aktifitas pertambangan yang berada di Desa Lawang Uru tidak menetap karena bergantung pada kondisi lapisan tanah dasar sungai yang menjadi sumber mineral berupa emas, namun tetap berada di sepanjang pinggiran sungai Kahayan.

Sejarah kegiatan pertambangan yang dilakukan disepanjang sungai Kahayan telah berlangsung sejak tahun 1980an dan diantaranya menggunakan cara manual untuk menambang emas di bantaran sungai Kahayan (Ester Suoth et al., 2020). Besarnya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan emas menjadi daya tarik utama masyarakat lokal Provinsi Kalimantan Tengah terutama di masyarakat lokal di Desa Lawang Uru. Keunggulan kualitas mineral emas yang terdapat di Desa Lawang Uru telah membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Indeks Desa Membangun tahun 2020, Desa Lawang Uru diklasifikasikan sebagai desa berkembang dan ini sesuai dengan kondisi lapangan yang peneliti temukan. Kemajuan desa ini tidak terlepas dari situasi ekonomi masyarakat lokal di Desa Lawang Uru yang merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kesejahteraan penduduk desa. Selain kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, Desa Lawang Uru juga menghasilkan komoditas lain, yaitu kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Desa Lawang Uru mencapai 243,9965 hektar, dengan sebagian besar dikelola oleh PT. Citra Agro Abadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian mengamanatkan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan Besar (IUP-B) diwajibkan untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar, minimal seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang dikelola oleh perusahaan. Namun, saat ini banyak keberadaan perusahaan kelapa sawit termasuk yang berada di Desa Lawang Uru tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut. Perusahaan kelapa sawit tetap melaksanakan kegiatan industri mereka yang luas lahan kebun kelapa sawit mengalami penambahan tanpa adanya ijin dari masyarakat desa.

Tidak hanya keberadaan kebun kelapa sawit yang perlu mendapatkan perhatian khusus, namun aktivitas penambangan lokal milik warga juga harus diberikan atensi. Aktivitas pertambangan emas di sepanjang Sungai Kahayan, khususnya penggunaan merkuri yang berlebihan telah meningkatkan pencemaran air Sungai Kahayan. (F.Dirun et al., 2021). Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dan tindakan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.

Dengan demikian, pendampingan intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan peneliti, dianggap penting untuk membantu masyarakat desa Lawang Uru menghadapi tantangan ini secara efektif dan berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan dapat tercapai apabila pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat juga perlu memperhatikan unsur-unsur penyongkong kehidupan masyarakat terutama lestari sumber

daya alam yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk.

b. Pembangunan Berkelanjutan

Menciptakan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya berasal dari APBN namun memerlukan adanya kemandirian dari masyarakat desa itu sendiri. Sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah dan desa diperlukan untuk mendukung terciptanya masyarakat desa yang mandiri. Masyarakat desa yang mandiri akan membantu menyukseskan pembangunan nasional. Namun, disisi lain upaya untuk memandirikan desa ini harus memperhatikan potensi dan keadaan sumber daya alam yang menjadi penyokong utama kehidupan masyarakat.

Salah satu upaya mempertahankan pembangunan nasional dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam adalah dengan berpedomankan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang mana didalamnya terdapat kesadaran penuh adanya tantangan dan ancaman yang mendesak dalam pembangunan nasional saat ini. (Wang et al., 2022). Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat upaya untuk memutuskan rantai kemiskinan dengan meningkatkan kemakmuran ekonomi, lingkungan yang terjaga kelestariannya, inklusi sosial, perdamaian dan pemerintahan yang baik di masing-masing negara. (Ramadhani & Prihantoro, 2020; Ramasubramanian & Ramakrishna, 2023).

Wawancara peneliti kepada masyarakat desa dan aparatur desa menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Lawang Uru yang notabene bekerja sebagai penambang emas belum menyadari dampak kegiatan penambangan emas terhadap ekosistem di Sungai Kahayan. Lokasi penambangan emas yang di sepanjang pesisir Sungai Kahayan sudah beberapa kali mengalami perpindahan.

Adapun yang menjadi penentu perpindahan lokasi tambang adalah ketersediaan mineral emas di lokasi tambang yang sedang dieksplorasi tersebut. Telah banyak Pengabdian Kepada Masyarakat yang membuktikan bahwa kelestarian Sungai Kahayan sudah terancam akibat aktivitas penambangan emas di lakukan baik di hulu ataupun di hilir Sungai Kahayan. Sebagian besar kualitas air Sungai Kahayan telah tercemar oleh limbah merkuri yang bersumber dari kegiatan penambangan emas dan tidak layak untuk dikonsumsi. (Neneng et al., 2020).

Pada akhir tahun 2022 telah terjadi konflik antara masyarakat Desa Lawang Uru dan pihak perusahaan sawit. Konflik ini disebabkan perusahaan tidak memberikan plasma sejak pertama kali kegiatan panen hasil. Kepala Desa menyampaikan awal mulanya masyarakat desa tidak mengetahui hak plasma yang mereka miliki. Namun, setelah dilakukan pendekatan intens dan dialog yang komprehensif kepada masyarakat desa guna menjelaskan hak-hak yang mereka terima dari keberadaan perusahaan sawit ditemukan bahwa masyarakat desa belum mengetahui akan hak tersebut.

Hingga saat ini belum ada dialog terbuka antara perusahaan dengan masyarakat desa. Dari temuan ini keberadaan perusahaan kelapa sawit telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di Desa Lawang Uru. Apabila konflik terjadi secara berkelanjutan maka akan menghambat pembangunan Desa Lawang Uru. Konflik ini juga menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama pada butir ke 16 (enam belas) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan penggunaan merkuri dan konflik antara perusahaan dan masyarakat desa mengindikasikan bahwa kegiatan

pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk membantu keberlanjutan kehidupan masyarakat Desa Lawang Uru.



Gambar 1. Wawancara peneliti bersama Kepala Desa Lawang Uru

c. Urgensi Program Pemberdayaan Masyarakat

Secara teoretis, pemberdayaan didefinisikan sebagai hubungan atau menghubungkan antara kekuatan dan kemampuan yang dimiliki setiap orang, terutama kemampuan alamiah. Pemberdayaan ini juga menekankan pentingnya tindakan aktif yang berkaitan dengan kebijakan dan keinginan untuk menghasilkan perubahan sosial. (Rappaport, 1981, 1984). Dalam beberapa kasus, terminologi pemberdayaan terkait erat dengan kesejahteraan individu dan aspek politik dan sosial yang lebih luas. Pemberdayaan ini juga berfokus pada upaya indentifikasi kemampuan dengan memetakan faktor resiko dan hubungan timbal balik antara lingkungan dan masalah sosial. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk menyelesaikan masalah, memberikan masyarakat (kelompok yang menjadi obyek pemberdayaan) kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan melibatkan kelompok profesional melalui kerja sama.

Pemberdayaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berpusat pada upaya membangun komunitas lokal dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, kritis, saling peduli,

partisipasi kelompok, terbukanya akses kepada sumber daya utama bagi semua pihak dan tidak adanya diskriminasi. (Perkins & Zimmerman, 1995). Pemberdayaan ini juga menggunakan prinsip demokrasi dan mendorong pola pikir kritis terhadap lingkungan. (Tohari, 2020). Dalam pelaksanaannya pemberdayaan kepada masyarakat berpusat pada proses pemberdayaan itu sendiri dan hasil yang ingin diperoleh. Istilah "hasil yang diberdayakan" mengacu pada praktik pemberdayaan yang memungkinkan kita mempelajari hasil dari proses pemberdayaan seperti pengaruh kebijakan, perkembangan jaringan, dan pertumbuhannya. Dalam hasil dari proses pemberdayaan mencakup kontrol yang dirasakan berdasarkan situasi dan kemampuan mobilisasi sumber daya.

Dalam pelaksanaannya terdapat 7 (tujuh) tahapan dalam pemberdayaan. (Adi, 2008).



Bagan 1. Tujuh Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas

Sumber: Adi, R. I. (2008). Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Peneliti menemukan diperlukan adanya bentuk penataan ulang dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Penataan ulang kembali disebabkan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya tidak berjalan dengan optimal karena adanya perubahan yang signifikan terhadap model interaksi sosial masyarakat di Desa Lawang Uru. Perubahan yang terjadi ini peneliti uraikan dalam analisis SWOT berikut.



Pendekatan awal yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan sosio-kultural. Dalam pendekatan sosio-kultural merupakan upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan memperhatikan secara komprehensif aspek-aspek yang memperngaruhinya. Adapun

aspek-aspek yang diperhatikan adalah agama, budaya, pendidikan, adat istiadat, ekonomi, politik dan hukum. Aspek-aspek yang dimaksudkan ini juga disebut sebagai dimensi sosio-kultural. Selama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilakukan pendekatan sosio-kultural terutama dalam menggali permasalahan dan kondisi masyarakat terutama melalui aspek adat istiadat dan agama.



Gambar 2. Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama masyarakat Desa Lawang Uru

Dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama Dr. Agus Afandi, beliau menyarankan bahwa untuk mencapai masyarakat desa Lawang Uru yang mandiri melalui proses pemberdayaan masyarakat adalah dengan menguatkan dan meningkatkan aktivitas penyuluhan. Keberhasilan proses penyuluhan ini bergantung dengan metode komunikasi yang digunakan oleh pemateri dan penyuluh tersebut. Dalam temuan peneliti masyarakat desa Lawang Uru kurang menyukai adanya diskusi bersifat kaku/formal. Pendekatan kepada masyarakat desa Lawang Uru harus dilakukan dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan yang terutama adalah mengetahui dengan baik kebutuhan utama masyarakat.

d. Tantangan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Lawang Uru

Dalam tulisan Darwanto yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masyarakat Kecil” tahun 2004 menuliskan ada 4 (empat) unsur

dalam pemberdayaan masyarakat yaitu. (Khausar, 2012)

1. Inklusi dan partisipasi;
2. Akses pada informasi;
3. Kapasitas organisasi; dan
4. Profesionalitas pelaku pemberdaya.

Empat unsur diatas menjadi pedoman selama ini dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan apabila terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi maka program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Peneliti mencermati kembali keempat unsur pemberdayaan diatas dan menemukan bahwa keberadaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam sebuah desa sangat diperlukan.

Setiap orang memiliki potensi sosial yang luar biasa, dan ketika potensi ini bekerja sama dengan kepentingan umum, akan menjadi kekuatan yang signifikan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional. (Mahadiansar et al., 2020) Potensi ini dapat berkembang apabila adanya upaya saling bekerjasama terutama dalam pembangunan nasional. Kerjasama yang merupakan bagian dari hubungan sosial manusia terjadi diberbagai tingkat dan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini peneliti memfokuskan kepada kerjasama untuk membangun desa dari antar masyarakat desa. Kerjasama ini dapat menjadi sumber daya sosial yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. (Astono et al., 2022).

Hubungan sosial yang berkelanjutan didasarkan pada kepercayaan antara individu. Kepercayaan ini memicu adanya empati di antara sesama anggota komunitas, yang tercermin dalam tindakan saling mendukung ketika ada anggota komunitas yang menghadapi kesulitan. (Darwis et al., 2022). Keharmonisan hubungan sosial antar individu masyarakat

akan menjadi dasar terbentuknya modal sosial dan dapat menunjang aktivitas pembangunan masyarakat tersebut dalam berbagai aspek. (Sugeng Pujiharto, 2021).

Modal sosial merupakan sebuah pemikiran yang mengakui bahwa berbagai permasalahan sosial dapat diantisipasi dengan efektif jika dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan dan kerjasama merupakan aspek penting untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Keberadaan masyarakat yang bekerja bersama memiliki dampak positif lebih besar dari modal berupa materi (kekayaan atau uang). Modal sosial ini terbentuk apabila adanya kemauan baik bersama, persahabatan, sikap empati dan simpati serta rasa saling memiliki terhadap sesama masyarakat.

Bourdieu dalam tulisannya berjudul *“the Forms of Capital”* menuliskan bahwa transaksi modal ekonomi tidak akan dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan modal yang bersifat *immaterial* dalam modal budaya dan modal sosial. (Hannaway & Richardson, 1987; Richardson, 1986). Modal sosial adalah keseluruhan sumber daya yang aktual ataupun potensial yang berasal dari jaringan hubungan, dan jaringan hubungan ini harus dilandasi sikap saling memiliki, saling mengenal dan saling mengakui. Efektif atau tidaknya modal ini tergantung seberapa besar kuantitas ataupun kualitas jaringan hubungan, volume modal sosial, budaya dan ekonomi.

Berbagai temuan masalah dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lawang Uru dan menjadi hambatan terbentuknya modal sosial di Desa Lawang Uru. Besarnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dapat dioptimalkan guna membangun desa menjadi desa mandiri ataupun desa maju. Demikian pula dengan potensi yang dimiliki oleh kualitas masyarakat Desa Lawang Uru. Kepala Desa menyampaikan bahwa adanya kesulitan mengumpulkan masyarakat desa

untuk berdiskusi bersama guna membangun desa Lawang Uru. Masyarakat desa Lawang Uru menilai bahwa kegiatan pertemuan bersama seluruh masyarakat desa untuk berdiskusi bersama merespon kondisi sosial desa terkini dan kasus-kasus yang perlu mendapatkan perhatian seksama tidak penting untuk diadakan. Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat lapangan ini juga peneliti melihat antar masyarakat desa tidak menjalin komunikasi yang intensif kepada tetangga dan kehadiran pemuka agama juga direspon dengan sentimen negatif.

Kepala Desa juga menjelaskan masyarakat desa tidak menaruh kepedulian pada pembangunan fasilitas publik seperti pembangunan sekolah. Pusat kehidupan masyarakat Desa Lawang Uru telah mengalami sekali perpindahan yang mana sebelumnya berada di seberang Sungai Kahayan. Kepala Desa menambahkan bahwa adanya bentuk penolakan dan ketidakpercayaan penduduk desa terhadap upaya pembangunan sekolah ketika masyarakat desa masih bermukim di lokasi Desa Lawang Uru sebelumnya. Peneliti melakukan validasi terhadap jawaban Kepala Desa dalam kegiatan FGD dan menemukan kebenaran dari ungkapan Kepala Desa tersebut. Bagi sebagian masyarakat desa karena kondisi fasilitas pendidikan yang kurang mengambil keputusan untuk mengirimkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan di Kota Palangka Raya atau Kabupaten Gunung Mas.

Keberadaan modal sosial membawa dampak positif bagi sebuah desa. Melalui modal sosial masyarakat dapat diperdayakan untuk memiliki kesiapan membangun desa secara berkelanjutan. Desa Lawang Uru memerlukan adanya modal sosial ini agar program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana. Melalui modal sosial dan terwujudnya program pemberdayaan

masyarakat segala bentuk potensi yang dimiliki oleh Desa Lawang Uru yakni dari sektor sumber daya alam dapat memberikan kemakmuran secara berkelanjutan dan kedayatahan bagi kehidupan masyarakat desa.



Gambar 3. Anggota masyarakat desa menyampaikan problematika Sosial yang mereka hadapi di Desa Lawang Uru.

SIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui tahap awal program pemberdayaan masyarakat di Desa Lawang Uru menghasilkan beberapa temuan. Masyarakat Desa Lawang Uru memiliki tingkat kemandirian perekonomian melalui mata pencaharian mereka sebagai penambang emas. Kualitas emas yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Lawang Uru mendapatkan pengakuan positif oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Rata-rata keadaan hidup masyarakat Desa Lawang Uru cenderung sejahtera, namun kehidupan masyarakat Desa Lawang Uru tidak dapat dilepaskan dari berbagai problematik sosial yang hadir di desa tersebut. Keberadaan perusahaan kelapa sawit yang selama ini tidak menjalankan amanat perundangan-undangan yakni pemberian plasma kepada masyarakat memicu pertikaian dengan masyarakat desa. Aktifitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang Uru juga menyebabkan adanya ancaman baru bagi kehidupan masyarakat yakni pencemaran air di Sungai Kahayan oleh limbah merkuri.

Dari temuan potensi di Desa Lawang Uru dan problematika yang ada membuat peneliti menyatakan bahwa diperlukan adanya program pemberdayaan masyarakat dengan berasaskan

pedoman pembangunan berkelanjutan. Adapun urgensi oleh program pemberdayaan masyarakat ini agar masyarakat Desa Lawang Uru dapat memiliki kesiapan dalam menghadapi era industrialisasi yang tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif. Peneliti menemukan tantangan sekaligus hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Lawang Uru yakni kondisi sosial masyarakat Desa Lawang Uru yang tidak sepenuhnya harmonis. Masyarakat desa tidak peduli dengan pembangunan desa dan menunjukkan sikap tidak ramah kepada tokoh-tokoh masyarakat desa. Kondisi sosial demikian menyebabkan tidak terbentuknya modal sosial. Sedangkan, potensi yang dimiliki Desa Lawang Uru harus segera diperdayakan dengan bijaksana dan optimal bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kerjasama antar semua masyarakat desa dan tokoh masyarakat (pemuka agama, dan aparatur desa). Pengabdian Kepada Masyarakat belum selesai dilaksanakan dan belum terlihat hasil akhir yakni perkembangan signifikan dari kehidupan masyarakat desa sebagai hasil dari PKM ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian Kepada Masyarakat yang diPeneliti mengucapkan terimakasih kepada ketersediaan masyarakat Desa Lawang Uru untuk dapat menghadiri kegiatan FGD dan sosialisasi yang dilaksanakan di GKE Kahinje. Demikian juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak aparatur desa yang telah membantu menjembatani komunikasi antara peneliti dan masyarakat desa. Ucapan terimakasih juga peneliti berikan kepada pihak perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah membantu memberikan sesi materi dalam kegiatan FGD dan sosialisasi bersama masyarakat Desa Lawang Uru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. I. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Press.
- Ahmed, F., Ali, I., Kousar, S., & Ahmed, S. (2022). The environmental impact of industrialization and foreign direct investment: empirical evidence from Asia-Pacific region. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(20), 29778–29792. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17560-w>
- Al Siddiq, I. H., Saputra, M., & Untari, S. (2019). Rural Industrialization And The Impact On Citizens (The Shifting Of Agricultural Land Using In Henri Lefebvre's Space Perspective). *Proceedings of the International Conference on Rural Studies in Asia (ICoRSIA 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.69>
- AR Chaerudin, Bambang Setiadi, & Ahmad Munawir. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KREATIF DI DESA CITAMAN KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG BANTEN. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i1.9>
- Astono, A. D., Thurmudhi, A., & Kurniasari, D. (2022). PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA BUM DESA TARUNA AGUNG DI BIDANG PEMASARAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN NGAMPEL, KABUPATEN KENDAL. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.32620>
- Bertrand, A. L., & Osborne, H. W. (1959). The Impact of Industrialization on a Rural Community. *Journal of Farm Economics*, 41(5), 1127–1134. <https://doi.org/10.2307/1235254>

- Darkoh, M. B. K., & Kinyanjui, M. N. (2015). Industrialization and Rural Development in the Anglophone African Countries. *Journal of Developing Societies*, 31(3), 358–384. <https://doi.org/10.1177/0169796X15590325>
- Darwis, R. S., Gutama, A. S., & Zainuddin, M. (2022). PENDAMPINGAN PEMIMPIN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN TINDAKAN KOLEKTIF MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN BANTARAN SUNGAI CITARUM. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 179. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.36529>
- Elfaki, K. E., Handoyo, R. D., & Ibrahim, K. H. (2021). The Impact of Industrialization, Trade Openness, Financial Development, and Energy Consumption on Economic Growth in Indonesia. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040174>
- Fanny Inayah, Rts., Budhiartie, A., & Mushawirya, R. (2022). Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(2), 84–100. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i2.13296>
- F.Dirun, M. K., Gumiri, S., & Negara, D. J. (2021). Persepsi Masyarakat Bataran Sungai Kahayan Terhadap Pencemaran Kualitas Air. *Anterior Jurnal*, 20(2), 22–28. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.2116>
- Firdaus, D. A., Mahreda, E. S., Wahyu, W., & Lilimantik, E. (2022). ALIH FUNGSI LAHAN MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus Masyarakat Desa Murutuwu, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah). *EnviroScienteeae*, 18(1), 124. <https://doi.org/10.20527/es.v18i1.13001>
- Hannaway, J., & Richardson, J. G. (1987). Puzzles, Facts, and Tensions: Inquiry in the Sociology of Education. *Educational Researcher*, 16(6), 43. <https://doi.org/10.2307/1175546>
- Harun, N. I., Alamri, A. R., Walahe, D., & Jumiyanti, K. R. (2021). MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN BULAWA. *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32662/insancita.v3i1.1414>
- Khausar. (2012). MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Visipena Journal*, 3(2), 39–70. <https://doi.org/10.46244/visipena.v3i2.58>
- Li, Z., Rui, C., Liu, Y., & Wang, Y. (2023). Research on problems and countermeasures of rural industry integration development. *Highlights in Business, Economics and Management*, 14, 184–188. <https://doi.org/10.54097/hbem.v14i.8985>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Asparyana, A. (2020). PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Ma'rif, I., Faisol, A., & Vendyansyah, N. (2020). PEMETAAN DAERAH PERKEBUNAN BERDASARKAN LUAS DAN JUMLAH PRODUKSI DI KALIMANTAN TENGAH BERBASIS WEB. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 4(2), 170–175. <https://doi.org/10.36040/jati.v4i2.2672>
- Neneng, L., Ardianoor, A., Usup, H. L. D., Adam, C., Zakaria, Z., Ghazella, A., Perangin-angin, S. B., & Alvianita, V. (2020). Potensi *Chlorella* sp. dan *Pseudomonas* sp. dari Areal Tambang Emas sebagai Mikroorganisme Potensial Pereduksi Merkuri. *Jurnal Ilmu*

- Lingkungan*, 18(3), 617–625.
<https://doi.org/10.14710/jil.18.3.617-625>
- Nurkomala, N., Diswandi, D., & Fadliyanti, L. (2023). The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development. *European Journal of Development Studies*, 3(3), 76–82.
<https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268>
- Pan, L., Ye, J., & Wang, C. (2023). Embedding the poor into the industrial system: what we can learn from poverty alleviation through industrial development in China. *The Journal of Peasant Studies*, 50(7), 2750–2776.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2137408>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
<https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129.
<https://doi.org/10.46937/18202028913>
- Ramasubramanian, B., & Ramakrishna, S. (2023). What's next for the Sustainable Development Goals? Synergy and trade-offs in affordable and clean energy (SDG 7). *Sustainable Earth Reviews*, 6(1), 17.
<https://doi.org/10.1186/s42055-023-00069-0>
- Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9(1), 1–25.
<https://doi.org/10.1007/BF00896357>
- Rappaport, J. (1984). Studies in Empowerment. *Prevention in Human Services*, 3(2–3), 1–7.
https://doi.org/10.1300/J293v03n02_02
- Richardson, J. (1986). *Handbook of theory and research for the sociology of education*. Greenwood.
- Sugeng Pujiharto. (2021). PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MANDIRI PANGAN. *Media Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kabupaten Semarang*, 4(1), 26–36.
<https://doi.org/10.55606/sinov.v4i1.59>
- Sugiswati, B. (2012). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. *Perspektif*, 17(1), 31.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>
- Tohari, A. (2020). New Political Empowerment: Transcending Discourse Contestation between Caring versus Subjugation. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(3), 307–327.
- Wang, Q.-J., Wang, H.-J., & Chang, C.-P. (2022). Environmental performance, green finance and green innovation: What's the long-run relationships among variables? *Energy Economics*, 110, 106004.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106004>